**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN ASAL – USUL ANAK BIOLOGIS
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (PERKARA NOMOR.
249/PDT.P/2020/PA.KAB.KDR)**

Muhammad Asyrofi Abdillah

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri
E-mail: rofyrofu717@gmail.com

Misbakhul Anwar, M.H.

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri
E-mail : misbahliterasi717@gmail.com

ABSTRACT

Marriage in Indonesia must be carried out in accordance with Article 2 paragraph (1) and (2) of Law Number 1 of 1974 whereby marriages carried out by men and women must be registered with the local authorities to ensure orderly administration of government and population. As well as determining the origin of children in case number 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr, where husband and wife do not register their marriage, so problems arise when going to take care of the administration of the birth of a child in a child's birth certificate. This study aims to analyze the examination procedure and the legal basis for the judge's consideration in granting a case on the origins of biological children at the Kediri Regency Religious Court (case number 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr). This type of research uses empirical legal research methods using a sociological approach. This study uses primary data types, namely interviews and secondary data, namely data from books and research articles. While the data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Then this research was analyzed through the stages of data reduction, data validation, data clarification, and data analysis. The results and discussion of this study indicate that the legal basis is juridical and non-juridical. judges are oriented towards the protection of children's rights by taking into account the principle of the best interests of the child both from the psychological aspect of child development as well as aspects of legislation so that the determination of the case is fair.

Keywords: *Consideration of judges, biological children.*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (UU Perkawinan, 1974).

Perkawinan berdasarkan dalam hukum agama dan kepercayaan harus didaftarkan dalam instansi yang berwenang setempat untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan. (Situmorang dan Victor, 2002). Tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan tersebut dapat melindungi kedudukan seseorang dalam

menghindari adanya hal yang tidak diinginkan yang akan datang di kemudian hari.

Kondisi tertentu dan kurangnya pemahaman tentang hukum pencatatan perkawinan menyebabkan tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan tersebut menjadi tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Dalam pasal 2 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengharuskan untuk mencatatkan perkawinan. Dengan adanya keharusan pencatatan perkawinan tersebut, sebagai salah satu upaya untuk terjaminnya ketertiban perkawinan di masyarakat. Dapat diartikan juga, bahwa perkawinan yang dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah perkawinan yang sah.

Dalam hal ini, anak-anak yang lahir sebelum perkawinan yang sah menjadi anak tidak sah. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." (UU Perkawinan, 1974).

Mengenai kedudukan hukum anak dari akibat perkawinan yang tidak dicatatkan di instansi yang berwenang setempat menjadikan kedudukan anak tersebut tidak pasti, bisa dikatakan meskipun anak tersebut anak yang sah, tetapi tidak ada bukti nyata yang dapat dipakai sebagai bukti anak sah dan akan mempengaruhi kehidupan anak tersebut di masa depan, seperti hak memiliki bukti autentik dari negara.

Penetapan mengenai pengakuan terhadap anak telah di atur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 14 Tentang Perkawinan, yaitu anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Dari penjelasan di atas penulis melihat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Hakim Mengabulkan Putusan no.249/Pdt.P/2020/PA. Kab.Kdr tentang asal usul anak biologis. Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" pada putusan ini anak yang diajukan adalah anak yang lahir sebelum perkawinan yang sah.

Adapun untuk anak yang lahir hasil perzinahan, akta kelahirannya pertalian nasab anak hanya dihubungkan dengan ibunya saja dan tidak dapat diajukan permohonan asal usul anak karena kelahirannya di luar perkawinan. Meskipun diajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama, tentu akan di tolak. Sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan yang secara materiil sah berdasarkan hukum Islam, maka untuk mendapatkan akta kelahiran anak yang pertalian nasab anak dihubungkan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya, dapat ditempuh dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1. Melalui isbat nikah.
2. Melalui akad nikah dan permohonan asal usul anak.
3. Melalui permohonan asal usul anak tanpa isbat nikah.

Dari ketentuan diatas, Pengadilan Agama dapat mengabulkan perohonan dengan kemungkinan untuk anak sebagai persyaratan mendapatkan akta kelahiran dan salah satu syarat untuk menetapkan asal usul anak biologis dari ayah dan ibu yang melahirkannya (Asrofi, 2020).

Pengertian asal usul anak berasal dari dua kata yaitu asal usul dan anak, Asal usul yang berarti silsilah atau sejarah dan anak yang berarti keturunan. Asal usul anak berarti silsilah anak yang terjadi karena hubungan seorang pria dan wanita yang secara biologis telah melahirkan anak tersebut.

Secara teoritis pengertian anak biologis adalah "anak" mempunyai dua pengertian, yakni pengertian anak dalam pengertian biologis yaitu kedudukan sebagai anak yang disebabkan oleh faktor kelahiran, nasab, atau keturunan. dan pengertian ideologis yaitu kedudukan sebagai anak yang disebabkan oleh ikatan-ikatan nilai, seperti nilai kemanusiaan, kepatuhan, ikatan batiniah dan kesamaan pandangan. (Boulu, 2016).

Dari pengertian diatas di katakan anak biologis adalah asal-usul anak sebagai anak biologis yang sah karena untuk mengetahui dan memastikan anak tersebut adalah anak yang sah dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebagai orangtua biologisnya, karena anak tersebut lahir sebelum terjadinya perkawinan yang sah.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dimana hakim mempertimbangkan dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan demi keadilan dan mengandung kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim ini tidak sesuai dalam penyikapannya, maka berpengaruh pada putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Arto dan Mukti, 2004).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata

dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat (Muhaimin, 1969). Dengan maksud untuk mendapatkan data yang jelas dan bukti secara nyata tentang pertimbangan hakim terhadap penetapan asal-usul anak biologis perkara nomor 249/Pdt.P/2020.PA.Kab.Kdr di pengadilan agama kabupaten Kediri.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yaitu merupakan pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan - perubahan sosial (Pius dan Dahlan, 1994). Yakni dilakukan dengan cara terjun langsung untuk menemukan fakta atau realita yang sebenarnya. Fakta dan realita yang dimaksud berkaitan dengan asal - usul anak biologis. Pendekatan ini digunakan karena salah satu aspek yang akan diteliti mengenai pertimbangan hakim terhadap penetapan asal-usul anak biologis di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari sumber data primer yaitu wawancara kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, narasumber yang berkaitan dengan kasus permasalahan ini yakni Majelis Hakim Drs, H. Imam Syafi'i S.H, M.H. Sedangkan sumber data sekunder peneliti mengambil dari buku, artikel, jurnal dan penelitian terdahulu.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, validasi data, klasifikasi data dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang asal - usul anak biologis yang diperoleh oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Bapak Drs.H. Imam Syafi'i. S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1 A, hari Selasa tanggal 4 April 2023 adalah sebagai berikut:

Mengenai prosedur pemeriksaan perkara asal - usul anak biologis beliau memaparkan :

“Prosedur Pemeriksaannya sama seperti perkara biasa, namun cuma buktinya saja yang berbeda sesuai dengan perkaranya, setiap perkara itu akan diperiksa kalau sudah masuk dan lain sebagainya, jadi diusulkan dan akan dilihat dan diperiksa anaknya itu apakah sudah memiliki akta kelahiran kalau sudah mempunyai akta kelahiran ditunjukkan, kalau belum surat kenal lahir kemudian diurut betul - betul untuk memastikan

anak tersebut sebagai anaknya pemohon tentu yang akan ditentukan dalam pemeriksaan ini tentang asal - usul anak biologis dimana anak biologis ini biasanya kejadian - kejadian anak biologis itu kebanyakan anak - anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah tetapi tidak resmi secara undang - undang. Kemudian misal telah lahir seorang anak sementara orang tuanya tidak bisa diisbatkan bagaimana nasib anaknya, caranya masih ada solusi jalan keluar yaitu dengan mengusulkan permohonan asal - usul anak. Jadi sebetulnya anaknya tetap saja anak yang sah cuma anak lahir di luar pernikahan yang resmi sesuai dengan ketentuan undang - undang yang ada. Walaupun secara agama anak tersebut adalah anak biologisnya tetapi hukum tidak mengatakan seperti itu maka agar supaya anak itu masuk menjadi anaknya sehingga mempunyai hubungan hukum dengan orangtua nantinya secara kewarisan, pernikahan, perwalian dan sebagainya jangan sampai tidak ada orang tuanya dan tidak ada yang bertanggung jawab, karena jika tidak begitu akan bermasalah pada masa depan anak, yang jelas perlindungan anak itu dalam rangka untuk masa depan anak.”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara penetapan asal - usul anak sudah sesuai dengan peraturan perundang - undangan Pasal 42 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Dari sini, dapat diketahui bahwa prosedur pemeriksaan perkara nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr, yang pertama harus diperiksa adalah kepemilikan akta kelahiran kemudian diurutkan untuk memastikan anak tersebut adalah anak dari para pemohon. prosedur pemeriksaannya sama seperti perkara biasa, namun hanya buktinya saja yang berbeda sesuai dengan perkaranya.

Atas pernyataan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti - bukti yang ada dan mohon penetapan. Sehingga prosedur pemeriksaan penetapan asal - usul anak pada perkara nomor 249/Pdt.P/2020/PA. Kab.Kdr sesuai dengan prosedur pemeriksaan permohonan di Pengadilan Agama.

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa prosedur pemeriksaan pihak yang mengajukan permohonan asal - usul anak sudah sesuai dengan syarat formil (Pasal 170,171 dan 172 HIR) dan

materiil khususnya pada hal pembuktian. memenuhi syarat pemeriksaan.

Adapun pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan asal - usul anak biologis pada putusan nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr beliau memaparkan : “Jadi betul - betul pertimbangan hakim dengan bukti - bukti dari hasil pemeriksaan, hakim akan mempertimbangkan bahwa anak itu sudah benar anaknya para pemohon. Dalam putusan ini hakim mengabulkan permohonan asal - usul anak biologis dengan mengacu pada aturan sesuai dengan undang - undang yang ada dan dengan bukti - bukti yang kuat tadi tentunya untuk mengarahkan kepada dikabulkannya permohonan, sehingga hakim yakin bahwa anak itu adalah anak para pemohon. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal - usul anak, hakim dalam memeriksa harus secara jeli harus didukung dengan bukti yang sangat valid dan kuat meskipun tujuannya bagus membantu anak tapi jangan sampai mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya dia langsung sebelum hasil pemeriksaan sudah sesuai, jangan sampai menisbatkan orang dengan orang lain karena pengangkatan anak itu pada dasarnya tidak boleh memindahkan statusnya orangtua asli kepada orangtua yang baru, maka harus hati - hati dalam menjatuhkan putusan”.

Dari hasil wawancara diatas mengenai dasar hukum yang digunakan majelis hakim mengacu kepada aturan sesuai yang sesuai dengan Undang - Undang dan bukti - bukti yang kuat. Selain itu hakim juga mengacu pada hal - hal yang sifatnya non yuridis yaitu kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis.

Pada perkara nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr adalah permohonan tentang asal - usul anak biologis, dimana pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dalam pokok perkara ini bahwa pemeriksaan perkara penetapan asal - usul anak sudah sesuai dengan peraturan perundang - undangan Pasal 42 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Bahwa prosedur pemeriksaan perkara nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr, yang pertama harus diperiksa adalah kepemilikan akta kelahiran

kemudian diurutkan untuk memastikan anak tersebut adalah anak dari para pemohon. prosedur pemeriksaannya sama seperti perkara biasa, namun hanya buktinya saja yang berbeda sesuai dengan perkaranya.

Bahwa sebelum pernikahan pemohon melahirkan seorang anak, sehingga dalam mengurus Akta Kelahiran anak mengalami kesulitan karena anak tersebut lahir sebelum para pemohon menikah secara resmi berdasarkan bukti Buku Nikah.

Pengadilan Agama memiliki fungsi dan peran dalam penegakan keadilan, kebenaran dan kepastin hukum. Sesuai pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa ” (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 103 ayat (1) KHI, “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.(2) Bila akta kelahiran dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penutupan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (1) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang berwenang setempat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.” (UU Perkawinan, 1974).

Oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang untuk mengeluarkan penetapan perkara ini, yakni perkara nomor: 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr tentang permohonan asal - usul anak biologis yang didaftarkan oleh para pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Adapun pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan asal - usul anak biologis pada perkara nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr adalah pertimbangan hukum yuridis dan non yuridis.

Dari kebenaran yuridis yang mencerminkan kepastian ini apakah landasan hukumnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan kebenaran yuridis menjadi aspek pertama dan dasar sumber utama hakim dalam menjatuhkan putusan perkara yang berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim harus memahami undang-undang berkaitan sesuai dengan perkara yang di hadapi.

Undang-undang yang dijadikan sebagai patokan dalam menjatuhkan putusan, hakim tetap harus menilai apakah dari undang-undang tersebut sudah

adil dan bermanfaat, serta pantas ditegakkan kepastian hukum tersebut. Sebab menciptakan keadilan adalah salah satu unsur tujuan hukum (Rifai dan Ahmad, 2010).

Pertimbangan - pertimbangan hukum hakim tersebut antara lain Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak tersebut lahir di luar perkawinan orang tuanya secara resmi yang dalam penetapan ini sebagai para Pemohon, namun Majelis Hakim telah menganggap bahwa perkawinan para Pemohon telah diakui secara resmi karena para Pemohon telah menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan adanya akta nikah atas nama keduanya, atas dasar akta nikah itulah maka Majelis Hakim menimbang bahwa para Pemohon telah memenuhi *legal standing* untuk mengajukan permohonan asal usul anak tersebut. Dari hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dengan dilakukan pemeriksaan secara teliti melalui pembuktian dan kedua belah pihak mengakui anak kandungnya tersebut perlu disahkan, karena Majelis Hakim menganggap anak tersebut tidak membawa dosa orang tuanya di masa lalu.

Menurut Majelis Hakim dikabulkannya penetapan tersebut sangat bermanfaat bagi anak yang dimohonkan tersebut. Terkait dampak dari dikabulkannya penetapan asal - usul anak tersebut adalah anak tersebut mempunyai bukti bahwa dia adalah anak dari kedua orang tuanya, anak tersebut mendapat perlindungan hukum, mendapatkan kejelasan tentang kedudukannya di mata hukum, mempunyai *legal standing* untuk mengaku sebagai anak ayah dan ibunya yang tentunya berakibat pada berbagai proses administrasi kedenpannya karena tentunya hal-hal yang terkait dengan administrasi sangat diperlukan seperti penentuan ahli waris, perwalian, dan hak-hak lainnya. Maka jelas siapa yang bertanggung jawab atas anak tersebut sehingga anak tersebut tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat.

Untuk lebih mempermudah memperoleh gambaran tentang dasar pertimbangan hakim baik

dalam aspek yuridis, filosofis dan sosiologis dalam perkara nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr. Berikut kebenaran yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan penetapan permohonan tentang pengesahan anak nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai applicator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang - undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi (Rifa'i dan Ahmad, 2010).

Sehubungan dengan dasar pertimbangan hakim yang memperhatikan unsur kebenaran yuridis, sekaligus mencerminkan asas kepastian hukum Penulis melakukan analisis pada penetapan dalam perkara permohonan pengesahan asal - usul anak dengan nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr Berikut analisis kebenaran yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan penetapan permohonan tentang pengesahan anak nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Dalam penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 249/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr. Majelis Hakim menyatakan bahwa alasan-alasan permohonan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam namun perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, kemudian sebelum perkawinan tersebut sudah lahir seorang anak.

Kemudian saat pembuatan akta kelahiran anak tersebut para Pemohon mengalami kesulitan dan halangan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan penetapan tentang asal - usul anak ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah atau anak biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengabulkan permohonan para Pemohon, dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut menetapkan seorang anak, sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II. Majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anaknya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri.

Aspek yuridis yang mencerminkan kepastian hukum. Bertitik tolak pada ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan diatas, penetapan tersebut telah memuat dasar alasan yuridis yang jelas dan rinci sebab berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan yang dilakukan oleh para pemohon sudah sesuai undang-undang yang adil, bermanfaat, ataupun memberikan kepastian hukum jika diterapkan pada pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan penetapan permohonan tentang pengesahan anak.

Dari kebenaran non yuridis setelah hukumnya ditemukan dan kemudian hukumnya diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan penetapan dengan mempertimbangkan dua aspek yang seyogyanya diterapkan secara proporsional, yaitu kebenaran filosofis dan sosiologis.

Sebuah kebenaran dan keadilan merupakan aspek filosofis. Nilai-nilai filosofis pancasila menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa harus tercerminkan pada putusan hakim. Muatan nilai dasar keadilan juga harus ada dalam putusan hakim serta dengan kepastian hukum karena tidak hanya kemengan dalam sidang semata untuk mencari keadilan.

Dalam memutuskan perkara, hakim harus menggunakan perasaan dan hati nuraninya tidak dapat langsung mengambil dari Undang-undang karena dengan adanya keadilan serta dengan kepastian hukum maka hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya (Wijaya,dkk, 2016).

Berdasarkan pertimbangan non yuridis hakim dalam menetapkan permohonan asal – usul anak biologis terhadap perkara nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr memenuhi kebenaran filosofis. Bahwa dalam mempertimbangkan permohonan anak, hakim berorientasi pada perlindungan atas hak - hak anak dengan mempertimbangkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun aspek peraturan perundang - undangan Sehingga penetapan atas perkara tersebut bernilai adil.

Kebenaran sosiologis merupakan aspek yang adil dan bijaksana dalam mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat serta

dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Harapan bagi masyarakat nilai sosiologis harus memberi manfaat, hukum itu sendiri di buat untuk manusia, maka jangan sampai menimbulkan keresahan kepada masyarakat dalam melaksanakan hukum.

Penerapan aspek filosofis dan sosiologis jelas sangat sulit memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas, karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terkait pada sistem. Dari ketiga cara diatas tersebut yakni agar putusan bisa dianggap adil dan diterima oleh masyarakat (Rifa'i dan Ahmad, 2010).

Pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim sejatinya dilakukan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan dengan berpegang hukum, undang-undang, dan nilai keadilan pada masyarakat. Penerapan perundang-undangan secara benar dan adil menjadi sebuah amanat kepada diri pribadi hakim. Apabila penerapannya tidak dapat menimbulkan ketidakadilan maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral yang sesuai dengan hati nurani hakim. Hukum yang bisa sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang baik yang mencerminkan pada nilai-nilai keadilan.

Sistem hukum di Indonesia berpegangan pada undang-undang yang menganut sistem sipil. Tetapi hakim bisa menemukan hukum melalui putusan-putusan. Meskipun ada aturan yang harus ditaati, yakni hakim tidak boleh melawan isi dan falsafah dari peraturan perundang-undangan (Ali dan Ahmad, 1993).

Berdasarkan pertimbangan non yuridis hakim dalam menetapkan permohonan asal – usul anak biologis terhadap perkara nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr memenuhi kebenaran sosiologis. Bahwa supaya anak itu masuk menjadi anaknya sehingga mempunyai hubungan hukum dengan orangtua nantinya secara kewarisan, pernikahan, perwalian dan sebagainya jangan sampai tidak ada orang tuanya dan tidak ada yang bertanggung jawab, karena jika tidak begitu akan bermasalah pada masa depan anak, yang jelas perlindungan anak itu dalam rangka untuk masa depan anak.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pemeriksaan perkara penetapan asal - usul anak biologis nomor perkara 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sama seperti perkara biasa dan sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan Pasal 42 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan prosedur pemeriksaan perkara sudah sesuai dengan syarat formil (pasal 170 HIR mengatur tentang kebebasan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian atas alat bukti saksi yang diajukan kepadanya, pasal 171 HIR tiap – tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya dan pasal 172 HIR yang berbunyi : namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian keria berwenang untuk menjadi saksi) dan materiil khususnya pada hal pembuktian.
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan asal - usul anak biologis pada perkara nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr, majelis hakim mengacu pada pertimbangan hukum yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hukum yuridis pada perkara ini adalah Pasal 2, Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 2 juncto Pasal 7 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 49 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 14 sampai 44 KHI. Sedangkan pertimbangan hukum non yuridis yaitu kebenaran filosofis (nilai keadilan) dan sosiologis (bijaksana dan sesuai dengan nilai budaya di Indonesia).

Saran

1. Bagi pemerintah Sebaiknya mengadakan sebuah program sosialisasi akan pentingnya taat pada aturan hukum khususnya untuk peraturan perkawinan, karena pada dasarnya tujuan aturan

hukum itu dibuat untuk menjamin kepastian hukum.

2. Bagi Masyarakat Sebaiknya sadar akan aturan hukum mengenai perkawinan yang dilegalkan pemerintah khususnya mengenai perkawinan yang resmi karena itu merupakan legalitas hukum perkawinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Ahmad. 1993. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Drs. Asrofi SH., MH. 2020. *Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*. Pengadilan Agama Mojokerto, (Online), (<http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>), diunduh tanggal 26 Januari 2023.
- Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 1969), hlm. 83.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arkola, 1994), hlm. 719.
- Rifa'i, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum*. Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Situmorang, Victor M. 2002. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. . Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, Brian Kukuh, dkk. 2016 “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14/PID.SUS.ANAK/2015.PN.SMG)” . *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5.
- Fathan Boulu. 2016. “Konsep Anak Menurut M. Quraish Shihab dan Implikasinya Terhadap Pendidikan”. *Jurnal ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)*. Vol. 1. (1).